

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis tertarik untuk mengangkat Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam usaha pencapaian Penyelesaian Konflik Sahara Barat sebagai judul skripsi ini. Pertama, Kebijakan PBB sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia, karena PBB merupakan sebuah Organisasi Internasional yang memiliki pengaruh yang luas terhadap negara-negara di dunia. Begitu juga dengan kasus Sahara Barat, keinginan Sahara Barat untuk menyatakan kemerdekaan dari Maroko mendapat dukungan dari PBB dengan mengirimkan utusan khusus MINURSO (*Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental*) yang difasilitasi oleh PBB.

Kedua, bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, serta berusaha untuk meredam berbagai konflik yang terjadi dengan menugaskan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi permasalahan keamanan dunia. Untuk itu penulis tertarik mengetahui usaha-usaha apa yang telah dilakukan PBB dalam pencapaian kemerdekaan Sahara Barat. Mengingat PBB telah menduduki wilayah Sahara Barat sejak terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Ketiga, Sahara Barat merupakan wilayah pendudukan Spanyol dan sesuai perjanjian 14 November 1975, 2/3 bagian diserahkan pada Maroko dan 1/3 lainnya pada Mauritania. Pendudukan wilayah Sahara Barat mendapat tentangan dari kelompok yang menamakan dirinya Front Polisario (*Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro* – cat. ‘Saguia el Hamra y Rio de Oro’ adalah Sahara Barat) yang menuntut wilayah tersebut sebagai tanah air mereka. Front tersebut memproklamkan berdirinya SADR (*Saharan Arab Democratic Republic*) pada 27 Februari 1976. Front Polisario mendapat dukungan dari Aljazair dan melancarkan gerilya dengan Maroko dan Mauritania. Perjuangan untuk memerdekakan diri adalah upaya untuk menentang hegemoni kekuasaan Maroko.

Alasan inilah yang melatar belakangi penulis menulis skripsi dengan judul **”Intervensi PBB Dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat Pada Tahun 2005 - 2007”** dengan studi kasus konflik yang terjadi antara Maroko dengan Front Polisario.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah lembaga internasional yang dibentuk atas keinginan Negara-negara untuk menjaga agar terciptanya perdamaian dan keamanan di dunia.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia diperlukan sebuah lembaga internasional yang diharapkan memiliki kebijakan-kebijakan yang adil terhadap distribusi kesejahteraan Negara-negara anggotanya. Organisasi

- internasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan transportasi dan komunikasi. Misalnya, organisasi yang sangat dikenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tumbuh dan berkembang menjadi organisasi internasional terbesar di dunia dan memiliki fungsi yang sangat kompleks. PBB tidak hanya menangani keamanan global, tetapi organisasi ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang sangat kurang mendapat perhatian. Untuk mengatasi berbagai permasalahan telah dibentuk badan-badan yang memiliki tugas masing-masing. Selain itu, PBB juga memiliki andil untuk menciptakan aturan bagi Negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan dalam kerangka perundingan damai sebagaimana tercantum dalam artikel 2 piagam PBB.

Walaupun telah berdiri lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki wewenang besar dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi, namun tidak menjamin terciptanya penyelesaian masalah. Karena PBB bukan merupakan suatu sistem politik yang mampu bertindak sendiri atau menguasai sistem internasional. Efektivitasnya ditentukan oleh kualitas politik dan ras kebersamaan anggotanya.<sup>1</sup>

Organisasi yang beranggotakan seluruh Negara di dunia ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang tertuang dalam Bab VI Piagam PBB tentang Pacific Settlement of Disputes (ayat 33). Dan sesuai dengan tujuan PBB yang tercantum dalam artikel 1 piagam PBB.<sup>2</sup> Sehingga peran PBB sangat

---

<sup>1</sup> Jones, Walter S, *Logika Hubungan Internasional*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, PT.Gramedia, Jakarta, 1993. Hal 402.

<sup>2</sup> Kusuma Atmaja, Mochtar, *Perdamaian Dunia dan Peranan PBB*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. Hal 89.

diharapkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi baik konflik antar etnis maupun konflik antar Negara untuk menciptakan perdamaian. Begitu juga halnya ketika konflik antar Negara terjadi di Sahara Barat, PBB juga memberikan andil.

Upaya penyelesaian yang direncanakan PBB tahun 1991 dalam bentuk pengiriman pasukan perdamaian MINURSO (*Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental*), berjumlah 800-1000 personil yang terdiri dari pegawai PBB, militer dan polisi PBB untuk mengawasi jalannya referendum. Kegagalan referendum membuat kehadiran MINURSO terus diperpanjang hingga tahun 2002. Pada tahun 2003 PBB mengeluarkan Resolusi 1495/2003 Upaya penyelesaian damai antara lain melalui Baker Plan I dan diperbaharui Baker Plan II (James Baker, mantan Menlu AS, *special envoy* PBB). DK PBB juga berupaya mengantisipasi keinginan Maroko yang ingin menguasai Sahara Barat seutuhnya dengan memberikan "Political Room" guna memungkinkan pencapaian solusi definitif atas dasar kesepakatan bersama. Dan upaya yang lain juga dilakukan pembebasan terhadap 408 tawanan Maroko yang hingga saat ini masih ditahan di Camps Tindouf, LSM Watonouna mulai melakukan penggalangan untuk mengumpulkan sejuta tanda tangan di seluruh kota Maroko yang selanjutnya akan dikirimkan ke PBB dengan tujuan agar Sekjen PBB melakukan intervensi serius bagi pembebasan tawanan tersebut. Di samping itu, menurut ketua LSM Watonouna, Naima Mechrefi, pengumpulan satu juta tanda tangan tersebut juga dimaksudkan agar seluruh warga Maroko lebih peka terhadap kondisi yang dialami para tawanan di kamp Polisario. Penggalangan tanda tangan ini bertepatan 'Mari Bersatu untuk Bebaskan Tawanan Maroko di Camps Tindouf.

Dengan kejadian ini intervensi PBB sangat penting karena perundingan demi perundingan yang telah dilakukan selalu gagal. Akan tetapi PBB tidak putus asa, PBB tetap melanjutkan dengan Resolusi 1541/2004 PBB kembali menyampaikan dukungan kepada Baker Plan II. Pertengahan tahun 2004 James Baker mundur yang kemudian digantikan Mr. Alvaro De Soto sebagai utusan khusus PBB mengenai masalah Sahara Barat. diperkirakan alasan kemundurannya antara lain karena tidak mampu mencapai kemajuan, selama tujuh tahun dalam tugasnya tersebut, serta frustrasi akan sikap Maroko yang kurang kooperatif terhadap implementasi Baker Plan I dan II. Sampai akhir tahun 2004 pun penjajahan Maroko masih menyerang rakyat Sahara Barat, mencuri sumber daya alam dan memisahkan keluarga dengan 2.700 km dinding pasir, yang dijajari pos militer dan ranjau-ranjau, dan telah menewaskan 100 lebih jiwa rakyat Sahara Barat. Untuk menghadapi ini, masyarakat Saharawi telah mengkritik kekerasan sebagai solusi utama. Kami telah membentuk pemerintahan, dipilih secara demokratis, yang telah diakui lebih dari 80 negara dan sebagai salah satu anggota Uni Afrika (AU). Pendudukan Maroko tidak diakui oleh siapapun. Namun kehadiran pendudukan militer Maroko di Sahara Barat sejak 1975 telah merepresentasikan penghambatan yang signifikan atas proses dekolonisasi dunia secara efektif. Beberapa negara juga sama posisinya dengan Indonesia untuk mengupayakan proses *win-win decolonization* atas Sahara Barat.

Untuk lepas dari Maroko tidak mudah karena dibutuhkan perjuangan, keberanian, dan kerja keras agar kemerdekaan dapat terwujud. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan Front Polisario yang didukung oleh Aljazair, Afrika

Selatan dan Kenya untuk melepaskan diri dari Maroko setelah mengalami konflik yang berkepanjangan.

Dari sini menarik untuk dikaji bagaimana Intervensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2005-2007 sebagai Organisasi Internasional yang mewadahi penyelesaian konflik Internasional antara Maroko dengan Front Polisario.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan ulasan yang dikemukakan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Intervensi PBB dalam penyelesaian konflik Sahara Barat pada tahun 2005 - 2007?

### D. Kerangka Dasar Teori

Menurut Mochtar Mas'ood Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi<sup>3</sup>. Selain dapat dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi<sup>4</sup>. Dalam buku lain dijelaskan Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika sehingga menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, dan diharapkan bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah<sup>5</sup>.

Adapun konsep yang digunakan penulis dalam menganalisa Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat adalah konsep mengenai bentuk-bentuk

<sup>3</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, halaman 185.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Metode*. Pusat Antar Universitas Studi Social, UGM, Yogyakarta, 1988, halaman 161.

intervensi pihak ketiga, dan selanjutnya konsep-konsep yang lebih detail tentang bentuk intervensi yang dipakai PBB dalam konflik Sahara Barat.

Sebelumnya akan diterangkan terlebih dahulu "apa yang dimaksud dengan pihak ketiga" dalam penyelesaian konflik. (Richard B Bilder 1992) dalam "*What is mean by Third Party Dispute Settlement*" menjelaskan bahwa pihak ketiga diartikan sebagai seseorang atau suatu kelompok yang berada di luar area konflik yang mencoba membantu para pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan jalan keluar. Pihak ketiga dapat merupakan suatu Negara, atau Sekelompok Negara, Organisasi Internasional Pemerintah, Arbitrator, Organisasi non Pemerintah, Individu atau Sekelompok Individu yang memiliki kapasitas. Dalam hal kedudukan PBB adalah sebagai pihak ketiga yang berbentuk Organisasi Internasional yang memiliki tujuan dan diharapkan intervensi PBB dalam konflik Sahara Barat dapat membantu menyelesaikan konflik Internasional.

Loraleigh Keashly, dkk telah membuat klasifikasi bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga.

#### A. Taxonomy of Third Party Intervention<sup>6</sup> :

1. Conciliation (Konsiliasi/Dewan Pendamai)
2. Consultation (Dewan Penasehat)
3. Pure Mediation (Mediator)
4. Power Mediation
5. Arbitration (Arbitrase)
6. Peacekeeping (Pasukan Penjaga Perdamaian)

<sup>6</sup> Loraleigh Keashly & R J Fisher, *Toward a Taxonomy of Third Party Intervention in Intergroup Conflict: A Comparative Review of Mediation and Consultation*, Dept of Pshicology: University of Saskatchewan, 1990

Selanjutnya berbagai bentuk intervensi pihak ketiga diatas oleh Keashly, dkk

(1992) disederhanakan menjadi tiga bagan besar beriku ini:

Gambar 1. Diagram Berbagai macam Intervensi Pihak Ketiga<sup>7</sup>

Diagram A : Arbitrase

Diagram B : Mediasi

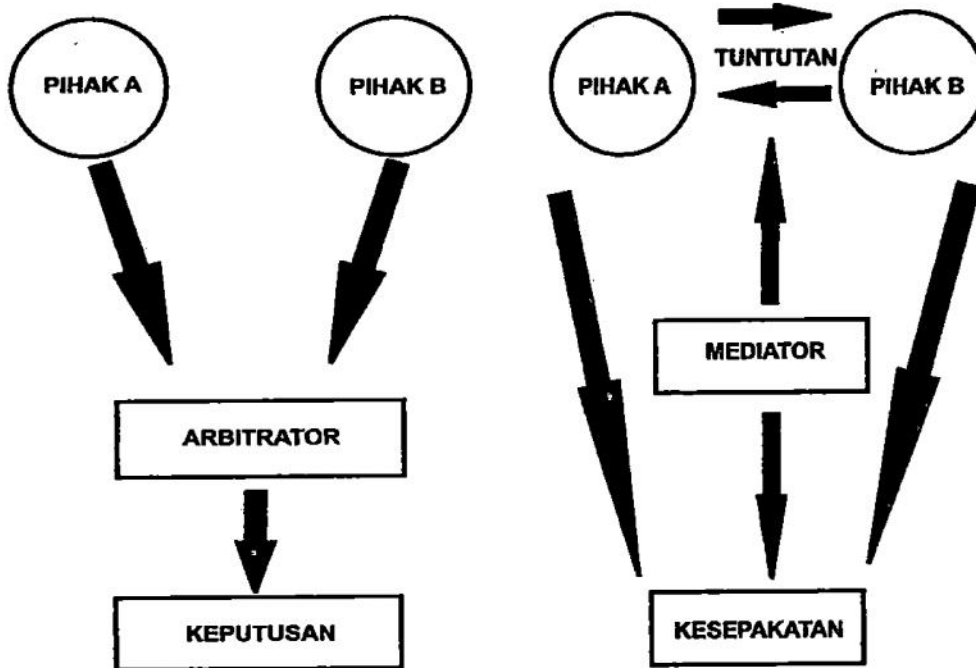
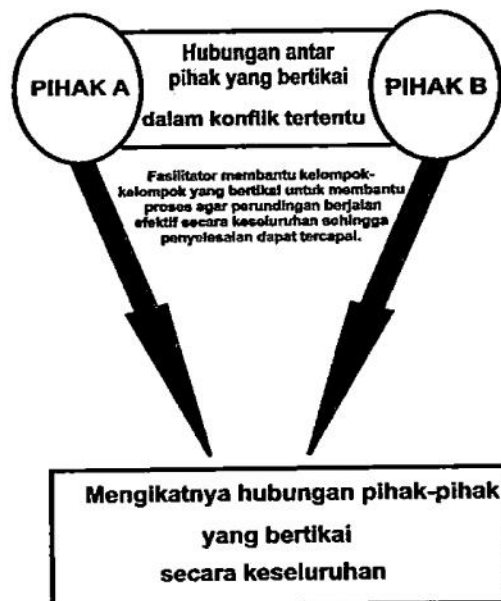


Diagram C: Fasilitasi (Gambar 1)



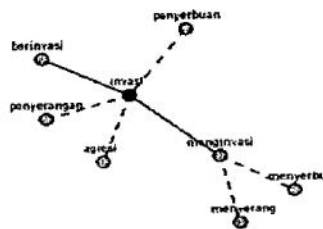
<sup>7</sup> Ibid



Dari konsep yang dipakai dalam upaya penyelesaian konflik di Sahara Barat dapat di dibedakan tentang invasi dengan intervensi. Invasi adalah perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut.<sup>8</sup> Dari segi tujuan invasi dan intervensi sangat jauh berbeda, jika invasi mempunyai tujuan untuk menguasai atau mengambil alih negara yang dimasuki sedangkan intervensi memiliki tujuan untuk membantu negara yang sedang berada dalam konflik mencari jalan keluar (saran) yang dapat diterima kedua belah pihak yang berkonflik.

Gambar 2. Aplikasi dari Kata Invasi

<http://www.artikata.com>



Berdasarkan konseptual yang telah disebutkan diatas maka asumsi pertama yang dapat diajukan adalah intervensi PBB dalam konflik Maroko dengan Front Polisario berbentuk *mediasi* (Diagram B).. Mediasi adalah proses peredaaan sengketa damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk membantu

<sup>8</sup> [www.artikata.com/arti-331000-invasi.php](http://www.artikata.com/arti-331000-invasi.php) diunduh, 27 Desember 2010.

memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa .  
(Zartman 1996).

Intervensi PBB sebagai pihak ketiga, membantu mencari jalan penyelesaian atas konflik antara Maroko dengan Front Polisario dan PBB bukan sebagai badan yang berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat seperti arbitrator. Adapun peran yang dijalani PBB melebihi dari sekedar fasilitator.

Oleh (Moore 1986)<sup>9</sup> ditambahkan bahwa pihak ketiga tersebut harus dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik, tidak memihak, serta netral untuk membantu mendapatkan jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karena dalam konsep mediasi dibutuhkan tiga unsur penting <sup>10</sup> yaitu *acceptability* (kesediaan kedua belah pihak yang berkonflik untuk menerima hadirnya mediator), *impartiality* (sifat tidak memihak, adil), dan *neutrality* (netralitas). Dari tiga unsur diatas PBB telah memenuhi syarat pertama untuk dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bertikai, yakni dapat diterima sebagai pihak ketiga baik oleh Maroko maupun Front Polisario. Sedangkan dua unsur lainnya yakni *impartial*, dan *neutral* merupakan dua unsur yang diharapkan menjadi sifat PBB agar dapat memediasi konflik tersebut secara efektif. Meskipun (Rubin and Brown 1975)<sup>11</sup>, berpendapat bahwa kehadiran dari pihak yang independen dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menyelesaikan masalah, namun demikian Moore

<sup>9</sup> Christopher Moore, *The Mediation Process*, San Fransisco: jossey Bass Publishers, 1986

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Rubin, J and Brown, B *Social Psychology of Bargaining and Negotiation*. Academic Press: New York 1975

menyebutkan bahwa "*No one can be entirely impartial*". Pendapat ini dikuatkan oleh William R (1990) bahwa dalam proses mediasi, ketika seorang intervenor cenderung terhadap satu pihak, hal tersebut merupakan usaha untuk menyeimbangkan power. Para disputan dalam perundingan, akibatnya dalam mediasi intervenor tidak selalu mempertahankan jarak yang sama antara pihak satu dengan yang lain.<sup>12</sup>

### **Intervensi PBB Sebagai Pihak Ketiga Melalui Teknik Mediasi**

Dalam mediasi terdapat tiga teknik dasar (Zartman and Touval 1996)<sup>13</sup> yang digunakan mediator:

*Pertama:* yaitu pada tingkat awal mediator cenderung akan membantu komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai karena eskalasi konflik yang terjadi telah membuat hubungan antara pihak-pihak yang bertikai memburuk dan berpengaruh pada terhambatnya para disputan untuk saling berunding dan membuat konsesi bersama. Disini peran mediator diperlukan sebagai komunikator agar terbangun komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai.

*Kedua:* mediator bertindak sebagai formulator ketika perundingan berjalan. Konflik yang berlangsung tidak hanya menghambat komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang bertikai namun juga dapat mengakibatkan para disputan sulit berfikir secara jernih untuk menemukan jalan keluar karena pada saat masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Maka dalam kondisi ini mediator

<sup>12</sup> William R, "If mediators are equidistant they cannot be impartial and they are impartial they cannot be equidistant", *The Third Party role: A Comparative Examination of Burto, curle, and Lau.* 1990

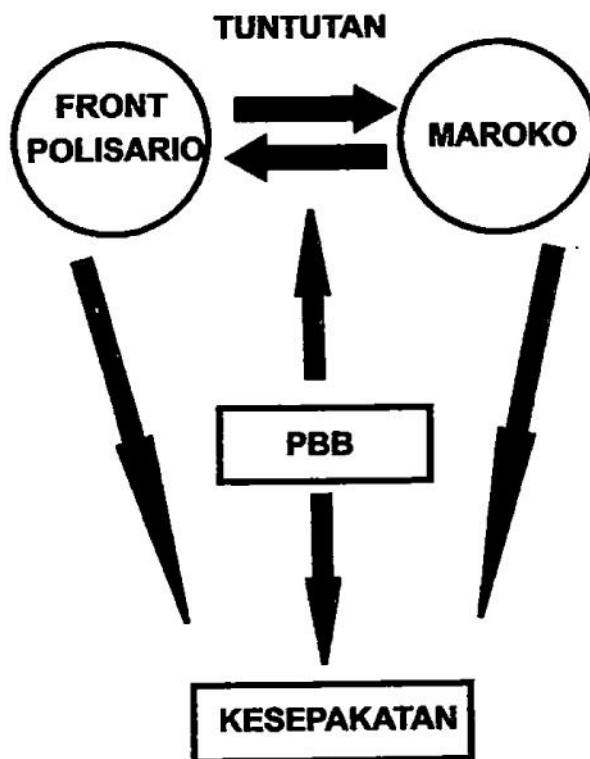
<sup>13</sup> Zartman, William and Touval, *Internasional Mediation in The Post Cold War Era, in Managing Global Chaos*, eds, p.453. Washington DC: United State Institute of Peace Press, 1996.

diperlukan lebih dari sebagai komunikator, melainkan sekaligus sebagai perumus jalan keluar (saran) yang dapat diterima kedua belah pihak.

*Ketiga*: sebagai *manipulator* (penggerak). Disini derajat keterlibatan mediator mencapai maksimum. Sebagai manipulator mediator menggunakan powernya untuk membawa para disputan melangkah pada kesepakatan, menekan agar menjauh dari konflik dan menuju pada tercapainya tujuan. Namun pada prinsipnya mediasi merupakan hasil hubungan ketiga teknik diatas. Dengan kata lain mediator tetap menggunakan ketiga teknis diatas dalam setiap proses mediasi, hanya penekanannya yang berbeda, sesuai dengan tingkatan hambatan yang ada dalam perundingan.

Gambar 3. Aplikasi Teori Dalam Penyelesaian Konflik di Sahara Barat Menurut

Loraleigh Keashly & R J Fisher



## E. Hipotesa

Berdasarkan konseptual tentang teknik mediasi maka asumsi yang diajukan PBB sebagai cara yang dipakai dalam proses mediasi di konflik Maroko dengan Front Polisario berubah-ubah, yaitu sebagai:

1. *Komunikator*, yaitu Upaya peredaaan damai antara lain PBB mengutus Baker Plan I dan di perbaharui Baker Plan II (James Baker, mantan Menlu AS).
2. *Formulator*, melalui kegiatan diadakan pemungutan suara pada SU PBB atas rancangan resolusi mengenai Sahara Barat. *Dan*
3. *Manipulator*, yaitu PBB menempatkan pasukan perdamaian (MINURSO) hingga tahun 2008.

## F. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan studi pustaka, dengan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang didapatkan dari literatur-literatur, situs-situs, internet, artikel-artikel, dokumentasi KEMLU, dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## G. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindarkan terjadinya perluasan pembahasan dalam penulisan ini. Maka penulis memberi batasan agar penulis tetap fokus pada perhatian sehingga tidak melebar terlalu jauh dan membantu memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

Sehingga pembatasan dalam penelitian ini adalah Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam usaha penyelesaian konflik Front Polisario dengan Maroko pada tahun 2005 yang konfliknya sedang memuncak dengan memperpanjang pasukan khusus PBB yaitu MINURSO (*Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental*) hingga Oktober 2005, kemudian mengganti utusan Sekjen PBB James Baker dengan Alvaro de Soto, menunjuk Court Mouzard sebagai Jenderal MINURSO, dan mengundang para duta besar anggota PBB untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum mendatang yaitu dengan tidak dalam posisi abstain. Dan pada tahun 2007 diadakan Pemilihan Umum atas usulan Aljazair dalam upaya penyelesaian konflik di Sahara Barat .

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan mengenai Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang Dinamika Keterlibatan PBB dalam konflik di Sahara Barat, Proses Kelembagaan PBB sebagai Penjamin Perdamaian Dunia, Tindakan PBB dalam menjaga perdamaian dunia, Perkembangan Konflik Sahara Barat antara Gerakan Front polisario dengan Maroko.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Dinamika Konflik di Sahara Barat antara Gerakan Front Polisario dengan Maroko, Sejarah Konflik, Sebab-sebab Konflik, Dampak-dampak Konflik, dan Eskalasi Konflik di Sahara Barat antara Front Polisario dengan Maroko.

Bab keempat, menjelaskan tentang Intervensi PBB dalam Konflik Sahara Barat antara Gerakan Front Polisario dengan Maroko, melalui 3 cara yaitu komunikator, formulator dan manipulator.

Bab kelima, berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi ini.